

Analisis Kemiskinan dan Pertumbuhan Ekonomi di Bali: Model TSLS

Putu Noppy Iswara¹⁾
Luh Gede Meydianawathi²⁾
I Gusti Bagus Indraajaya
I Made Adigorim

*Jurusan Ekonomi Pembangunan Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Universitas Udayana*

*iswaranoppy@gmail.com*¹⁾
*meydianawathi@gmail.com*²⁾

ABSTRAK

Tujuan penelitian ini yaitu menganalisis pengaruh timbal balik antara kemiskinan dan pertumbuhan ekonomi di Provinsi Bali selama periode 2009-2014. Teknik analisis yang digunakan yaitu *Two-Stage Least Square* (TSLS). Penelitian ini menguji pengaruh variabel pertumbuhan ekonomi, upah minimum, pendidikan, kesehatan, dan pengangguran terhadap kemiskinan, serta pengaruh variabel kemiskinan, tenaga kerja, pendapatan asli daerah dan investasi terhadap pertumbuhan ekonomi. Hasil analisis menunjukkan tidak terjadi pengaruh timbal balik antara kemiskinan dan pertumbuhan ekonomi di Provinsi Bali selama periode penelitian berlangsung. Adapun upah minimum regional, pendidikan dan kesehatan secara parsial berpengaruh negatif signifikan terhadap kemiskinan, begitu juga dengan tenaga kerja secara parsial berpengaruh signifikan positif terhadap pertumbuhan ekonomi. Guna menanggulangi kemiskinan melalui pertumbuhan ekonomi, diharapkan pemerintah berfokus pada sektor produktif di setiap wilayah yang dipadukan dengan tenaga kerja dan teknologi sehingga meningkatkan kesejahteraan masyarakat di setiap daerah.

Kata kunci: kemiskinan, pertumbuhan ekonomi, Two-Stage Least Square.

ABSTRACT

This research aimed to analyze reciprocal effect between poverty and economic growth in the province of Bali during the period 2009-2014. The analysis technique used this research is Two-Stage Least Square (TSLS). This research examined the effect of 5 variables: economic growth, minimum wage, education, health, and unemployment to poverty, and the impact of 4 variables: poverty, labor, local revenue, and investment to economic growth. The analysis shows that there is no reciprocal effect between poverty and economic growth in Bali province during the period of the research. Meanwhile, variables minimum wage, education and health have a significant effect on poverty, on the other hand, labor force have a significant effect on economic growth. In order to reducing poverty through economic growth, the government is expected to focus on productive sectors in every region combined with labor and technology so that will improve the welfare of people in each area.

Keywords: poverty, economic growth, Two-Stage Least Square.

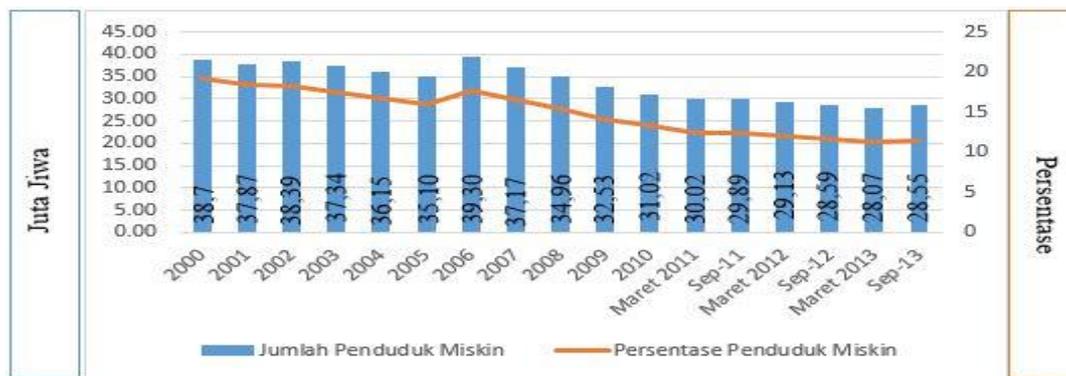
PENDAHULUAN

Kemiskinan merupakan terampasnya kesejahteraan individu. Kesejahteraan yang dimaksud dapat berupa hilangnya kapasitas seseorang untuk berfungsi di dalam masyarakat sehingga disebut dengan kemiskinan multidimensi (World Bank, 2000:1). Kemiskinan pada suatu negara dapat menyebabkan jasa dan pelayanan publik yang tersedia tidak mampu diserap oleh rakyat miskin sehingga mempengaruhi pertumbuhan ekonomi suatu negara (Jonaidi, 2012). Ketidakmampuan masyarakat miskin dalam menikmati jasa dan pelayanan publik yang ada mencerminkan rakyat miskin masih susah dalam memenuhi kebutuhan dasar minimum.

Dilema kemiskinan menjadi semakin parah pada keluarga miskin. Dilema ini terjadi akibat kondisi yang sulit dalam mengakses jasa dan pelayanan publik, seperti pendidikan dan kesehatan. Ditambah dalam mendapatkan kesehatan yang berkualitas sulit didapat dalam kondisi kemiskinan (Farthing, 2010). Kondisi ini disebut juga dengan kemiskinan kronis. Dalam mengatasi kemiskinan kronis diperlukan serangkaian kebijakan dalam meningkatkan kualitas seperti pendidikan dan kesehatan (Dariwardani, 2014). Pendidikan merupakan salah satu cara yang dapat menyelamatkan rakyat miskin dari kemiskinan. Disamping itu, pendidikan dapat membantu anak dari kaum miskin terbebas dari kemiskinan (Jiang dan Cheung, 2009). Akan tetapi apabila rakyat miskin tidak sadar akan pentingnya pendidikan maka mereka hanya akan jatuh ke dalam jurang kemiskinan. Kondisi ini disebut dengan rantai kemiskinan dimana kemiskinan yang ada saat ini

menyebabkan kemiskinan pada generasi selanjutnya (Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, 2013).

Permasalahan kemiskinan yang terjadi pada suatu negara akan menyebabkan penurunan tingkat kesejahteraan masyarakat. Kesejahteraan merupakan salah satu dari tujuan pembangunan di Indonesia yang tercantum dalam Pembukaan UUD 1945, yaitu memajukan kesejahteraan umum. Salah satu tolok ukur dalam kesejahteraan di Indonesia tercermin pada kemiskinan sehingga dengan penanggulangan kemiskinan, maka kesejahteraan pada suatu wilayah dapat dikatakan meningkat.



Gambar 1. Perkembangan Jumlah Penduduk Miskin (Kota+Desa) dan Persentase Penduduk Miskin (Kota+Desa) Di Indonesia Tahun 2000 - 2013

Sumber: Badan Pusat Statistik Indonesia, 2014

Gambar 1 menjelaskan upaya pemerintah dalam mengatasi permasalahan kemiskinan melalui penduduk miskin tahun 2000-2013. Sepanjang tahun 2000-2013, pemerintah dapat dikatakan berhasil dalam menanggulangi jumlah penduduk miskin setiap tahunnya walaupun pada tahun 2006 terjadi peningkatan kemiskinan. Akan tetapi, walau terjadi penurunan setiap tahunnya, laju penurunan jumlah penduduk miskin di Indonesia mengalami perlambatan.

Penurunan jumlah penduduk miskin yang melambat ini disebabkan karena adanya beberapa kendala dalam upaya menekan jumlah penduduk miskin. Kendala tersebut disebabkan oleh lokasi penduduk miskin yang sulit untuk dijangkau sehingga biaya distribusi yang dikeluarkan pemerintah lebih besar dibandingkan dengan bantuan yang disalurkan. Selain kendala lokasi, pertumbuhan ekonomi yang terjadi lebih menguntungkan masyarakat golongan atas dibandingkan golongan masyarakat menengah ke bawah. Fenomena ini terjadi karena masyarakat menengah atas telah memiliki aset, modal, ataupun kemampuan yang diperlukan agar mereka dapat meningkatkan pendapatan mereka. Sementara itu golongan masyarakat menengah ke bawah masih belum memiliki kemampuan tersebut (Nazara, 2006).

Berdasarkan laporan Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (2014), masyarakat dibagi menjadi 4 golongan, yaitu masyarakat golongan miskin, rentan, menengah, dan atas. Gambar 2 menerangkan bahwa masyarakat pada golongan miskin memiliki laju pertumbuhan pengeluaran yang berkisar $+/-2$ persen, sedangkan masyarakat golongan rentan memiliki laju pertumbuhan pengeluaran yang kurang dari 2 persen. Hal ini terjadi karena pada masyarakat miskin, pengeluaran yang terjadi masih dibantu oleh subsidi dan bantuan yang ada. Sementara itu, masyarakat rentan tidak lagi mendapatkan bantuan yang diperuntukkan untuk masyarakat miskin. Dengan demikian, terlihat bahwa masyarakat rentan sulit untuk meningkatkan pendapatannya karena dalam memenuhi kebutuhan dasar, mereka masih sangat bergantung pada bantuan yang ada.



Gambar 2. Pertumbuhan Pengeluaran Per Kapita Di Indonesia Tahun 2008 - 2012
 Sumber: Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan, 2014

Dalam upaya meningkatkan kesejahteraan dan menanggulangi kemiskinan, salah satu upaya yang efektif yaitu dengan memperbaiki pertumbuhan ekonomi setiap tahunnya (Silva dan Sumarto, 2014). Akan tetapi yang perlu disadari adalah pertumbuhan ekonomi pada satu sektor belum tentu bermanfaat bagi masyarakat miskin. Hal ini sangat bergantung pada profil pertumbuhan ekonomi yang ada. Peningkatan pertumbuhan ekonomi yang bersumber dari sektor produktif akan memberikan manfaat pada masyarakat miskin melalui peningkatan jumlah tenaga kerja. Berbeda pada sektor yang kurang produktif seperti pertanian, peningkatan pertumbuhan ekonomi yang bermanfaat bagi masyarakat miskin dapat dicapai melalui peningkatan produktivitas (Hull, 2009).

Pertumbuhan dan pembangunan ekonomi di Indonesia sangat bergantung pada sektor unggulan di setiap wilayah. Berdasarkan UU No. 23 Tahun 2014 mengenai Pemerintah Daerah, pelaksanaan pertumbuhan dan pembangunan ekonomi berbasis sektor unggulan maka pemerintah daerah diberikan wewenang dalam mengatur daerahnya sendiri. Provinsi Bali sendiri melaksanakan pertumbuhan dan pembangunan ekonomi berdasarkan sektor potensial yang ada di

masing-masing wilayah. Pendapatan asli daerah juga sebagai salah satu yang dapat membantu pertumbuhan dan pembangunan ekonomi (Barimbing dan Karmini, 2015). Pertumbuhan dan pembangunan ekonomi yang dilaksanakan diharapkan dapat mengatasi permasalahan kemiskinan yang ada.



Gambar 3. Jumlah Penduduk Miskin dan Pertumbuhan Ekonomi Di Provinsi Bali pada Tahun 2008 - 2013

Sumber: Bali Dalam Angka, 2014

Gambar 3 menjelaskan jumlah penduduk miskin dan pertumbuhan ekonomi di Bali tahun 2008-2013. Sepanjang tahun 2008-2013 terjadi kondisi yang tidak biasa antara pertumbuhan ekonomi dan jumlah penduduk miskin di Bali. Jumlah penduduk miskin dan pertumbuhan ekonomi pada tahun 2009 mengalami penurunan, sedangkan pada tahun 2010, pertumbuhan ekonomi dan jumlah penduduk miskin mengalami peningkatan. Kondisi yang tidak sesuai ini bisa saja akibat dari inflasi sehingga mempengaruhi pertumbuhan dan jumlah penduduk miskin di Bali. Tingkat inflasi pada tahun 2009 sebesar 4,37 persen yang kemudian pada tahun 2010 mengalami peningkatan yang tajam sebesar 8,1 persen (BPS, 2016). Inflasi yang tinggi ini dapat mempengaruhi kondisi perekonomian di setiap wilayah sehingga menyebabkan kemiskinan meningkat atau menurun. Selain tingkat inflasi, profil pertumbuhan ekonomi yang digunakan

mungkin kurang tepat untuk mengatasi permasalahan kemiskinan sehingga terjadi ketidaksesuaian antara pertumbuhan ekonomi dan kemiskinan.

Guna mengatasi permasalahan kemiskinan diperlukannya pertumbuhan ekonomi berkualitas. Pertumbuhan ekonomi dapat ditingkatkan dengan investasi. Investasi akan memberikan pertumbuhan ekonomi yang lebih bermanfaat kepada kaum miskin (Yusuf dan Summer, 2015). Tersedianya investasi akan membantu peningkatan produksi disetiap sektor melalui penambahan barang modal (Yuhendri, 2013). Disamping tersedianya barang modal, menurut Made Kembar Sri Budhi (2013), investasi juga membantu akumulasi modal manusia melalui peningkatan kualitas pendidikan dan kesehatan. Meningkatnya kualitas tenaga kerja akibat penanaman investasi akan memicu peningkatan produksi (Taufik dkk, 2014).

Pengentasan kemiskinan dapat dengan meningkatkan kualitas sumber daya manusia (SDM). Peningkatan SDM dapat diwujudkan melalui pendidikan, kesehatan, dan daya beli masyarakat yang pada umumnya merupakan kategori dari Indeks Pembangunan Manusia / IPM (Finkayana dan Urmila Dewi, 2016). Pembangunan sumber daya manusia melalui peningkatan pendidikan diharapkan masyarakat dapat memiliki tingkat pendidikan yang sesuai sehingga setiap individu memiliki kemampuan (*skill*) yang nantinya dapat digunakan untuk meningkatkan produktivitas dan memberikan nilai tambah pada setiap produk yang dihasilkan (Putri dan Yuliarmi, 2013). Pembangunan sumber daya manusia pada peningkatan kesehatan diharapkan masyarakat memiliki kondisi jasmani yang baik sehingga dapat melakukan kegiatan produksi (Faisal, 2013). Aspek

pembangunan sumber daya manusia yang terakhir adalah peningkatan daya beli masyarakat. Diharapkan dengan peningkatan daya beli masyarakat maka permintaan barang dan jasa akan terus ada sehingga kegiatan produksi akan dilaksanakan secara berkesinambungan untuk memenuhi permintaan.

Pada peningkatan daya beli masyarakat, upaya yang dapat dilakukan yaitu dengan cara menetapkan upah minimum yang selalu meningkat setiap tahunnya. Berdasarkan Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi No. 7 Tahun 2013, upah minimum adalah upah bulanan terendah yang terdiri atas upah pokok termasuk tunjangan tetap yang ditetapkan oleh gubernur sebagai jaring pengaman. Kebijakan upah minimum bertujuan untuk melindungi tenaga kerja dari dieksploitasi dan memberikan upah untuk memenuhi kebutuhan hidup layak. Terpenuhi kebutuhan hidup layak diharapkan kesejahteraan pekerja akan mengalami peningkatan dan menurunkan kemiskinan. (Prastyo, 2010). Adapun dalam mengatasi kemiskinan melalui upah minimum diperlukan peningkatan upah minimum riil dibandingkan dengan upah minimum nominal dikarenakan upah minimum riil menunjukkan peningkatan upah yang didasarkan pada kondisi perekonomian (Malloy, 2016).

Peningkatan upah yang terjadi juga dapat memicu pengangguran. Pengangguran yang terjadi akibat peningkatan upah tidak sesuai dengan peningkatan produktivitas tenaga kerja. Apabila upah harus dibayarkan perusahaan lebih tinggi dibandingkan dengan produktivitas tenaga kerja maka perusahaan akan mengurangi tenaga kerja yang ada. Pengurangan tenaga kerja yang dilakukan perusahaan akan meningkatkan pengangguran sehingga

menimbulkan kemiskinan baru. Menurut Sukirno (2004:360) pengangguran yang terjadi pada suatu wilayah akan menyebabkan peningkatan kemiskinan, karena individu yang menganggur akan kehilangan pendapatannya sehingga tidak mampu dalam memenuhi kebutuhan dasar minimum.

Adapun tujuan penelitian ini, yaitu menganalisis pengaruh timbal balik antara kemiskinan dan pertumbuhan ekonomi di Provinsi Bali. Variabel yang mempengaruhi kemiskinan, antara lain pertumbuhan ekonomi, upah minimum, pendidikan, kesehatan, dan pengangguran, disisi lain variabel yang mempengaruhi pertumbuhan ekonomi, antara lain kemiskinan, tenaga kerja, pendapatan asli daerah, dan investasi.

Tinjauan variabel eksogen yang mempengaruhi kemiskinan

a. Pengaruh upah minimum

Penetapan upah berdasarkan pendidikan hanya akan menyebabkan ketimpangan pendapatan antar tenaga kerja sehingga adanya upah minimum regional/provinsi akan mengurangi kesenjangan tersebut (Waisgrais, 2003). Akan tetapi, ketika penetapan upah yang tidak sesuai dengan kebutuhan yang ada maka akan timbul permasalahan kemiskinan. Kemiskinan ini terjadi akibat upah yang didapatkan tenaga kerja tidak dapat memenuhi kebutuhan dasar minimum. Berdasarkan penelitian Febrianica dan Pratomo (2015) menyimpulkan bahwa penetapan upah minimum akan membantu masyarakat dalam mencukupi kebutuhan hidup layak sehingga terbebas dari jerat kemiskinan. Istifaiyah (2015) menyimpulkan bahwa penetapan upah minimum pada dasarnya harus sesuai dengan kebutuhan hidup layak agar

tidak terjerat dalam kemiskinan. Putri dan Yuliarmi (2013) menyimpulkan bahwa penetapan upah minimum yang sesuai dengan kondisi perekonomian akan membantu masyarakat dalam memenuhi kebutuhannya sehingga terbebas dari kemiskinan. Yudha (2013) menyimpulkan bahwa penetapan upah minimum menyebabkan tenaga kerja berada pada kondisi yang sulit dalam memenuhi kebutuhan akibat fluktuasi harga. Peningkatan upah yang terjadi tidak semata-mata dapat memenuhi kebutuhan yang karena upah riil yang diterima lebih rendah dari upah nominal.

b. Pengaruh pendidikan

Penelitian Finkayana dan Urmila Dewi (2016) menyimpulkan bahwa pendidikan merupakan modal bagi seseorang dalam terbebas dari kemiskinan. Semakin tinggi tingkat pendidikan maka akan meningkatkan kualitas dari produk yang dihasilkan sehingga memberikan nilai tambah dan harga jual tinggi. Sudiana dan Sudiana (2015) menyimpulkan bahwa pendidikan akan menurunkan persentase kemiskinan disuatu wilayah walau diperlukan waktu yang cukup lama. Putri dan Yuliarmi (2013) menyimpulkan bahwa pendidikan akan menurunkan kemiskinan sehingga diperlukan adanya bantuan sosial dibidang pendidikan.

c. Pengaruh kesehatan

Pembangunan kesehatan dapat mendorong pertumbuhan ekonomi. kesehatan yang berkualitas menyebabkan meningkatkan produktivitas tenaga kerja sehingga mampu mendapatkan upah yang lebih banyak dalam memenuhi kebutuhan dan terbebas dari kemiskinan. Penelitian Finkayana

dan Urmila Dewi (2016) menyimpulkan bahwa kesehatan yang baik akan membantu tenaga kerja untuk tetap melakukan kegiatan produksi sehingga peluang dalam meningkatkan pendapatan semakin tinggi untuk mengatasi kemiskinan.

d. Pengaruh pengangguran

Tingginya pengangguran disuatu negara akan menimbulkan efek negatif bagi kesejahteraan. Berdasarkan penelitian Cholili dan M.Pudjihardjo (2014), pengangguran memiliki hubungan positif terhadap kemiskinan. Ketika mengatasi permasalahan kemiskinan, setiap individu yang menganggur tidak akan memiliki pendapatan sehingga tidak dapat memenuhi kebutuhannya. Tidak terpenuhi kebutuhan maka menyebabkan masyarakat tersebut masuk dalam kategori penduduk miskin. Wiguna dan Sakti (2013) menyimpulkan bahwa meningkatnya pengangguran akan meningkatkan kemiskinan dikarenakan angkatan kerja ada yang tidak terserap lapangan pekerjaan dan ada yang menunggu untuk mendapatkan pekerjaan yang lebih baik.

Tinjauan variabel eksogen yang mempengaruhi pertumbuhan ekonomi

a. Pengaruh tenaga kerja

Berdasarkan penelitian Cahyani dan Darsana (2016) menyimpulkan bahwa dalam jangka panjang tenaga kerja memiliki kontribusi positif terhadap pertumbuhan ekonomi. Barimbing dan Karmini (2015) menyimpulkan bahwa meningkatnya jumlah tenaga kerja akan meningkatkan produksi sehingga memicu pertumbuhan

ekonomi. Adipuryanti dan Sudibia (2015) menyimpulkan bahwa tenaga kerja mempengaruhi pertumbuhan ekonomi sehingga kegiatan ekonomi semakin berkembang.

b. Pengaruh pendapatan asli daerah

Berdasarkan penelitian Dewi dan Yuliarmi (2013) menyimpulkan bahwa peningkatan pendapatan asli daerah merupakan modal awal dalam timbulnya eksternalitas positif dan mempercepat pertumbuhan ekonomi. Barimbing dan Karmini (2015) menyimpulkan bahwa pendapatan asli daerah merupakan akses dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi di setiap wilayah.

c. Pengaruh investasi

Berdasarkan penelitian Cahyani dan Darsana (2016) menyimpulkan bahwa investasi merupakan modal awal dalam meningkatkan sarana dan prasarana di setiap wilayah sehingga membantu dalam peningkatan pertumbuhan ekonomi. Kunle M. *et al.* (2014) menyimpulkan bahwa investasi merupakan mesin penggerak dan sinyal positif terhadap membaiknya pertumbuhan ekonomi. Dewi dan Sutrisna (2015) menyimpulkan bahwa investasi dibutuhkan dalam penyediaan bahan baku, mesin dan gaji sehingga akan meningkatkan produksi dan akhirnya juga meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Yuhendri (2013) menyimpulkan bahwa pertumbuhan ekonomi di Sumatra Selatan ditentukan oleh investasi dalam mengembangkan sektor yang produktif.

Tinjauan timbal balik antara kemiskinan dan pertumbuhan ekonomi

Penelitian Istifaiyah (2015) menyimpulkan bahwa pertumbuhan ekonomi yang meningkat disetiap tahunnya akan meningkatkan kapasitas perekonomian yang nantinya menciptakan lapangan kerja baru dan peningkatan produktivitas tenaga kerja sehingga pendapatan akan meningkat dan mengurangi risiko seseorang terjerat dalam kemiskinan. Cholili dan M. Pudjihardjo (2014) menyimpulkan walaupun pertumbuhan ekonomi mengalami peningkatan, masih adanya ketimpangan distribusi pendapatan akan menyebabkan kemiskinan. Todaro (dalam Jonaidi, 2012) berpendapat bahwa kemiskinan dapat menyebabkan masyarakat golongan kurang mampu tidak memiliki akses dalam membiayai pendidikan dan kesehatan, melakukan kredit usaha, berinvestasi sehingga menyebabkan pertumbuhan ekonomi lebih kecil.

METODE PENELITIAN

Objek penelitian ini adalah kemiskinan dan pertumbuhan ekonomi, serta variabel lain yang juga mempengaruhi, antara lain upah minimum, pendidikan, kesehatan, pengangguran, tenaga kerja, Pendapatan Asli Daerah (PAD), dan investasi. Data yang digunakan merupakan data panel yang bersumber pada data sekunder. Data panel dalam penelitian ini, yaitu kemiskinan, upah, pendidikan, kesehatan, pengangguran, pertumbuhan ekonomi, tenaga kerja, PAD dan investasi kabupaten/kota di Provinsi Bali tahun 2009-2014 dengan menggunakan metode observasi non-prilaku.

Teknik analisis dalam penelitian ini adalah model persamaan simultan. Adapun model persamaan simultan secara matematis dapat dirumuskan sebagai berikut:

$$Y_1 = \beta_{10} + \beta_{11}Y_2 + \gamma_{11}X_1 + \gamma_{12}X_2 + \gamma_{13}X_3 + \gamma_{14}X_4 + u_1 \dots\dots\dots (1)$$

$$Y_2 = \beta_{20} + \beta_{21}Y_1 + \gamma_{25}X_5 + \gamma_{26}X_6 + \gamma_{27}X_7 + u_2 \dots\dots\dots (2)$$

Adapun keterangan pada model tersebut, yaitu Y_1 = Jumlah Penduduk Miskin; Y_2 = Pertumbuhan Ekonomi; X_1 = Upah Minimum Regional; X_2 = Rata Lama Sekolah; X_3 = Angka Harapan Hidup; X_4 = Pengangguran; X_5 = Tenaga Kerja; X_6 = Pendapatan Asli Daerah; X_7 = Investasi; u_1, u_2 = Unsur Gangguan.

Kondisi yang diperlukan dalam identifikasi model persamaan simultan, yaitu (Gujarati dan Porter, 2009:699):

- a) Tidak diidentifikasi (*underidentification*) apabila variabel predetermined (K-k) lebih kecil dari (<) variabel endogen (m) dikurangi 1 [$K-k < m-1$].
- b) Identifikasi tepat (*just or exact identification*) apabila variabel predetermined (K-k) sama dengan (=) variabel endogen (m) dikurangi 1 [$K-k = m-1$].
- c) Terlalu diidentifikasi (*overidentification*) apabila variabel predetermined (K-k) lebih besar dari (>) variabel endogen (m) dikurangi 1 [$K-k > m-1$].

Keterangan:

- K = Variabel eksogen dalam model
- k = Variabel eksogen dalam persamaan tertentu
- m = Variabel endogen dalam model

Adapun dalam ketentuan identifikasi diketahui persamaan 1, $K = 7$ $k = 4$, $m = 2$ dengan demikian jika dimasukkan kedalam M persamaan simultan $K-k > m-1$ maka $7-4 > 2-1$ didapatkan $3 > 1$ sehingga persamaan terlalu diidentifikasi (*overidentification*), sedangkan dalam persamaan 2, $K = 7$, $k = 3$, $m = 2$ jika dimasukkan kedalam M persamaan simultan $K-k > m-1$ maka $7-3 > 2-1$ didapatkan

4 > 1 sehingga persamaan terlalu diidentifikasi (*overidentification*). Oleh karena identifikasi dalam persamaan simultan terlalu diidentifikasi (*overidentification*), maka model persamaan simultan yang digunakan, yaitu *Two Stage Least Square* (TSLS).

Analisis TSLS dapat dibagi menjadi 2 tahap. Pada tahap 1 seluruh variabel endogen diregresikan atas semua variabel eksogen yang digunakan dalam model. Model ini disebut dengan persamaan *Reduce-Form*. *Reduce-Form* untuk persamaan kemiskinan dan pertumbuhan ekonomi adalah:

$$Y_1 = \hat{\Pi}_{10} + \hat{\Pi}_{11}X_1 + \hat{\Pi}_{12}X_2 + \hat{\Pi}_{13}X_3 + \hat{\Pi}_{14}X_4 + \hat{\Pi}_{15}X_5 + \hat{\Pi}_{16}X_6 + \hat{\Pi}_{17}X_7 + e_1 \dots\dots\dots (3)$$

$$Y_2 = \hat{\Pi}_{20} + \hat{\Pi}_{21}X_1 + \hat{\Pi}_{22}X_2 + \hat{\Pi}_{23}X_3 + \hat{\Pi}_{24}X_4 + \hat{\Pi}_{25}X_5 + \hat{\Pi}_{26}X_6 + \hat{\Pi}_{27}X_7 + e_2 \dots\dots\dots (4)$$

Adapun keterangan pada model tersebut, yaitu Y_1 = Jumlah Penduduk Miskin; Y_2 = Pertumbuhan Ekonomi; X_1 = Upah Minimum Regional; X_2 = Rata Lama Sekolah; X_3 = Angka Harapan Hidup; X_4 = Pengangguran; X_5 = Tenaga Kerja; X_6 = Pendapatan Asli Daerah; X_7 = Investasi; e_1, e_2 = Unsur Gangguan.

Pada tahap 2, nilai Y_1 dan Y_2 dalam persamaan struktural diganti dengan nilai taksiran dari dua persamaan regresi 1 dan 2 yang selanjutnya dilakukan regresi *Ordinary Least Squares* (OLS) sebagai berikut:

$$Y_1 = \beta_{10} + \beta_{11}\hat{Y}_2 + \gamma_{11}X_1 + \gamma_{12}X_2 + \gamma_{13}X_3 + \gamma_{14}X_4 + u_1^* \dots\dots\dots (5)$$

$$Y_2 = \beta_{20} + \beta_{21}\hat{Y}_1 + \gamma_{25}X_5 + \gamma_{26}X_6 + \gamma_{27}X_7 + u_2^* \dots\dots\dots (6)$$

Adapun keterangan pada model tersebut, yaitu Y_1 = Jumlah Penduduk Miskin; Y_2 = Pertumbuhan Ekonomi; \hat{Y}_1 = Taksiran Jumlah Penduduk Miskin; \hat{Y}_2 = Taksiran Pertumbuhan Ekonomi; X_1 = Upah Minimum Regional; X_2 = Rata Lama

Sekolah; X_3 = Angka Harapan Hidup; X_4 = Pengangguran; X_5 = Tenaga Kerja; X_6 = Pendapatan Asli Daerah; X_7 = Investasi; $u_1^* = u_1 + \beta_{11} e_2$; $u_2^* = u_2 + \beta_{21} e_1$.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Guna menganalisis pengaruh timbal-balik antara kemiskinan dan pertumbuhan ekonomi maka digunakan analisis *Two-Stage Least Squares* (TSLS) dengan bantuan IBM SPSS Statistics 23. Adapun hasil laporan analisis regresi yang dari model persamaan kemiskinan dan pertumbuhan ekonomi adalah sebagai berikut:

a) Hasil laporan regresi model kemiskinan

Y_1	=	3,461	+ 26,057 \hat{Y}_2	- 10,176 X_1	- 6,932 X_2	- 0,963 X_3	+ 0,000 X_4	+ u_1^*
SE	=	(4,082)	(0,000)	(0,998)	(0,225)	(0,000)		
t_{hit}	=	(6,383)	(-4,901)	(-6,945)	(-4,705)	(0,696)		
Sig.	=	(0,000)	(0,000)	(0,000)	(0,000)	(0,490)		
F_{hit}	=	13,877		Sig. = 0,000		$R^2 = 0,596$		

Adapun keterangan pada model tersebut, yaitu Y_1 = Jumlah Penduduk Miskin (JPM); \hat{Y}_2 = Taksiran Pertumbuhan Ekonomi; X_1 = Upah Minimum Regional (UMR); X_2 = Rata Lama Sekolah (RLS); X_3 = Angka Harapan Hidup (AHH); X_4 = Pengangguran; $u_1^* = u_1 + \beta_{11} e_2$.

b) Hasil laporan regresi model pertumbuhan ekonomi

Y_2	=	3,577	- 0,023 \hat{Y}_1	+ 6,205 X_5	+ 3,426 X_6	+ 7,470 X_7	+ u_2^*
SE	=	0,012	0,000	0,000	0,000		
t_{hit}	=	-1,970	4,337	0,310	1,049		
Sig.	=	0,055	0,000	0,758	0,299		

$$F_{hit} = 11,122 \quad \text{Sig.} = 0,000 \quad R^2 = 0,481$$

Adapun keterangan pada model tersebut, yaitu Y_2 = Pertumbuhan Ekonomi (PE); \hat{Y}_1 = Taksiran Jumlah Penduduk Miskin; X_5 = Tenaga Kerja; X_6 = Pendapatan Asli Daerah (PAD); X_7 = Investasi; $u_2^* = u_2 + \beta_{21} e_1$.

Pengujian Asumsi Klasik

Sebelum dilakukan proses analisis lebih lanjut, wajib dilakukan uji asumsi klasik untuk membuktikan model sudah memenuhi kaidah *BLUE (Best, Linier, Unbiased, and Estimator)*.

a. Autokorelasi

Tabel 1.
Hasil Uji Autokorelasi
Model Kemiskinan dan Pertumbuhan Ekonomi

Model	R	R Square	Durbin-Watson
Kemiskinan	.772	.596	1.730
Pertumbuhan Ekonomi	.694	.481	2.028

Sumber: hasil penelitian (2016)

Diketahui nilai Durbin-Watson model kemiskinan = 1,730, $k = 5$, $n = 53$.

Guna mengetahui model terbebas dari masalah autokorelasi dapat dilihat melalui nilai DW hitung dengan DW Tabel. Berdasarkan DW Tabel didapatkan $d_L = 1,3592$, $d_U = 1,7689$, $4 - d_U = 2,2311$, $4 - d_L = 2,6408$.

Tolak H_0 Autokorelasi Positif	Daerah ragu-ragu	Terima H_0	Daerah ragu-ragu	Tolak H_0 Autokorelasi Negatif	
0	d_L	d_U	$4 - d_U$	$4 - d_L$	4
	1,3592	1,7689	2,2311	2,6408	
	1,730				

Gambar 4. Penentuan Daerah Terima, Tolak, dan Ragu-ragu Nilai Durbin Watson dalam Pengujian Autokorelasi Pada Model Kemiskinan
Sumber: hasil penelitian (2016)

Nilai DW sebesar 1,730 yang jatuh di daerah ragu-ragu perlu dilakukan test lebih lanjut untuk mengetahui adanya autokorelasi atau tidak.

Tabel 2.
Hasil Uji Runs Test Model Kemiskinan

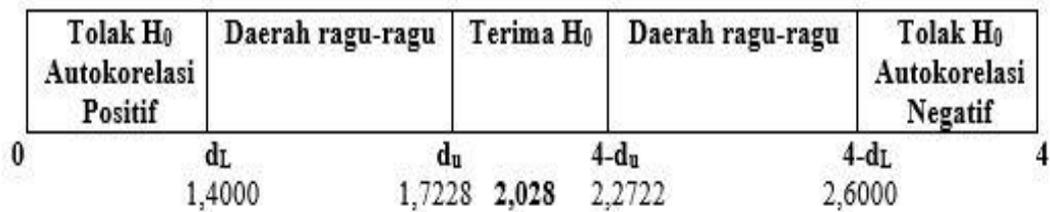
	Unstandardized Residual
Test Value ^a	-.12955
Cases < Test Value	26
Cases >= Test Value	27
Total Cases	53
Number of Runs	29
Z	.419
Asymp. Sig. (2-tailed)	.675

a. Median

Sumber: hasil penelitian (2016)

Berdasarkan Runs Test didapat Asymp. Sig. (2-tailed) sebesar 0,675 yang memiliki arti model kemiskinan terbebas dari autokorelasi.

Diketahui nilai Durbin-Watson model pertumbuhan ekonomi=2,028, k= 4, n= 53. Guna mengetahui model terbebas dari masalah autokorelasi dapat dilihat melalui nilai DW hitung dengan DW Tabel. Berdasarkan DW Tabel didapatkan $d_L= 1,4000$, $d_U= 1,7228$, $4-d_U= 2,2772$, $4-d_L= 2,6000$.



Gambar 5. Penentuan Daerah Terima, Tolak, dan Ragu-ragu Nilai Durbin Watson dalam Pengujian Autokorelasi Pada Model Pertumbuhan Ekonomi

Sumber: hasil penelitian (2016)

Nilai DW sebesar 1,041 yang jatuh di daerah Terima H_0 maka model pertumbuhan ekonomi tidak terdapat masalah autokorelasi.

b. Multikolinieritas

Berdasarkan Tabel 3 pada model kemiskinan didapat nilai *Tolerance* variabel Taksiran Pertumbuhan Ekonomi (\hat{Y}_2)= 0,237, UMR (X_1) = 0,274, RLS (X_2)= 0,496, AHH (X_3)=0,738, pengangguran (X_4)= 0,778. Nilai *VIP* pada variabel Taksiran Pertumbuhan Ekonomi (\hat{Y}_2) sebesar 4,220, UMR (X_1)= 3,647, RLS (X_2)= 2,014, AHH (X_3)=1,355, pengangguran (X_4)= 1,285. Nilai *Tolerance* > 0,1 dan *VIP* < 10 maka model terbebas dari multikolinieritas sehingga tidak terjadi korelasi antar variabel eksogen.

Berdasarkan Tabel 3 pada model pertumbuhan ekonomi didapat nilai *Tolerance* variabel Taksiran Jumlah Penduduk Miskin (\hat{Y}_1)= 0,523, tenaga kerja (X_5)= 0,465, PAD (X_6)= 0,441, investasi (X_7)= 0,550. Nilai *VIP* variabel Taksiran Jumlah Penduduk Miskin (\hat{Y}_1)= 1,911, tenaga kerja (X_5)= 2,150, PAD (X_6)= 2,266, investasi (X_7)= 1,820. Nilai *Tolerance* > 0,1 dan nilai *VIP* < 10 maka model terbebas dari multikolinieritas sehingga tidak terjadi korelasi antar variabel bebas/eksogen.

Tabel 3.
Hasil Uji Multikolinieritas Model Kemiskinan dan Pertumbuhan Ekonomi

Model		Collinearity Statistics	
		Tolerance	VIF
Kemiskinan	X1	.274	3.647
	X2	.496	2.014
	X3	.738	1.355
	X4	.778	1.285
	PRE_Y2	.237	4.220
Pertumbuhan Ekonomi	X5	.465	2.150
	X6	.441	2.266
	X7	.550	1.820
	PRE_Y1	.523	1.911

Sumber: hasil penelitian (2016)

c. Heterokedastisitas

Berdasarkan Uji Spearmandalam Tabel 4, nilai Sig. pada model kemiskinan didapat Taksiran Pertumbuhan Ekonomi (\hat{Y}_2) = 0,454, UMR (X_1) = 0,053, RLS (X_2) = 0,892, AHH (X_3) = 0,352, pengangguran (X_4) = 0,387 terhadap ABSRES_M1 > 0,05 sehingga tidak terdapat gejala heteroskedastisitas.

Berdasarkan Uji Spearmandalam Tabel 4, nilai Sig. pada model pertumbuhan ekonomi didapat variabel Taksiran Jumlah Penduduk Miskin (\hat{Y}_1) = 0,683, tenaga kerja (X_5) = 0,481, PAD (X_6) = 0,151, investasi (X_7) = 0,394 terhadap ABSRES_M2 > 0,05 sehingga tidak terdapat gejala heteroskedastisitas.

Tabel 4.
Hasil Uji Heterokedastisitas Model Kemiskinan dan Pertumbuhan Ekonomi

Model	Sig.	
Kemiskinan	X1	.053
	X2	.892
	X3	.352
	X4	.387
	PRE_Y2	.454
Pertumbuhan Ekonomi	X5	.481
	X6	.151
	X7	.394
	PRE_Y1	.683

Sumber: hasil penelitian (2016)

Pengujian secara serempak (Uji F)

Berdasarkan laporan analisis model kemiskinan diketahui $F_{hit} = 13,877$ dan $Sig. = 0,000 < 0,05$ sehingga H_0 ditolak yang memiliki arti bahwa PE, UMR, RLS, AHH, dan pengangguran secara serempak dan signifikan berpengaruh terhadap kemiskinan. Hasil uji F didukung dengan Koefisien Determinasi (R^2). Adapun $R^2 = 0,596$ yang berarti bahwa 59,6 persen variasi kemiskinan dijelaskan oleh variasi

pertumbuhan ekonomi, UMR, RLS, AHH, dan pengangguran, sedangkan sisanya lagi 40,4 persen dijelaskan oleh variasi diluar model.

Berdasarkan laporan analisis model pertumbuhan ekonomi diketahui $F_{hit} = 11,122$ dan $Sig. = 0,000 < 0,05$ sehingga H_0 ditolak yang memiliki arti bahwa JPM, tenaga kerja, PAD, dan investasi secara serempak dan signifikan berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi. Hasil uji F didukung dengan Koefisien Determinasi(R^2). Adapun $R^2 = 0,481$ yang berarti bahwa 48,1 persen variasi pertumbuhan ekonomi dijelaskan oleh variasi JPM, tenaga kerja, PAD, dan investasi, sedangkan sisanya lagi 51,9 persen dijelaskan oleh variasi diluar model.

Interpretasi hasil laporan analisis regresi model kemiskinan dan pertumbuhan ekonomi

1. Interpretasi model kemiskinan

a) Pengaruh pertumbuhan ekonomi terhadap kemiskinan

Berdasarkan laporan analisis kemiskinan menunjukkan $t_{hit} = 6,383$ dan $Sig. = 0,000 < 0,05$ sehingga H_0 ditolak yang memiliki arti pertumbuhan ekonomi berpengaruh signifikan dan positif secara parsial terhadap jumlah penduduk miskin. Koefisien variabel pertumbuhan ekonomi (β_{11})= 26,057, berarti apabila pertumbuhan ekonomi meningkat 1 persen, akan meningkatkan jumlah penduduk miskin di Bali sebesar 26.057 jiwa dengan asumsi variabel lainnya konstan. Sebaliknya, apabila pertumbuhan ekonomi menurun 1 persen, akan menurunkan jumlah penduduk miskin di Bali sebesar 26.057 jiwa dengan asumsi variabel lainnya konstan. Hubungan pertumbuhan ekonomi yang positif terhadap kemiskinan sesuai dengan

penelitian Cholili dan M.Pudjihardjo (2014) yang menyimpulkan bahwa peningkatan pertumbuhan ekonomi akan meningkatkan kemiskinan. Walaupun pertumbuhan ekonomi mengalami peningkatan, ketimpangan distribusi pendapatan masih terjadi sehingga menyebabkan kemiskinan meningkat.

b) Pengaruh upah minimum terhadap kemiskinan

Berdasarkan laporan analisis kemiskinan menunjukkan $t_{hit} = -4,901$ dan $Sig. = 0,000 < 0,05$ sehingga H_0 ditolak yang berarti upah minimum regional berpengaruh signifikan dan negatif secara parsial terhadap jumlah penduduk miskin. Koefisien variabel upah minimum regional (γ_{11}) = -10,176, memiliki arti bahwa apabila upah minimum regional meningkat 1 rupiah, akan menurunkan jumlah penduduk miskin di Bali sebesar 10.176 jiwa dengan asumsi variabel lainnya konstan. Sebaliknya, apabila upah minimum regional menurun 1 rupiah, akan meningkatkan jumlah penduduk miskin di Bali sebesar 10.176 jiwa dengan asumsi variabel lainnya konstan. Hubungan upah minimum regional yang negatif terhadap kemiskinan sesuai dengan penelitian Febriandian Pratomy (2015); Putri dan Yuliarmi (2013); Istifaiyah (2015) yang menyimpulkan bahwa penetapan upah minimum akan menurunkan kemiskinan. Penetapan upah minimum akan melindungi tenaga kerja dari eksploitasi dan mendapatkan upah yang sesuai dengan standar kehidupan layak sehingga terbebas dari kemiskinan.

c) Pengaruh pendidikan terhadap kemiskinan

Berdasarkan laporan analisis kemiskinan menunjukkan $t_{hit} = -6,945$ dan $Sig. = 0,000 < 0,05$ sehingga H_0 ditolak yang berarti rata lama sekolah berpengaruh signifikan dan negatif secara parsial terhadap jumlah penduduk miskin. Koefisien variabel rata lama sekolah (γ_{12}) = $-6,932$, berarti apabila rata lama sekolah meningkat 1 tahun, maka akan menurunkan jumlah penduduk miskin di Provinsi Bali sebesar 6.932 jiwa dengan asumsi variabel lainnya konstan. Sebaliknya, apabila rata lama sekolah menurun 1 tahun, maka akan meningkatkan jumlah penduduk miskin di Provinsi Bali sebesar 6.932 jiwa dengan asumsi variabel lainnya konstan. Hubungan pendidikan yang negatif terhadap kemiskinan sesuai dengan penelitian Finkayana dan Urmila Dewi(2016); Sudiana dan Sudiana(2015); Putri dan Yuliarimi(2013)dimana pendidikan merupakan salah satu faktor yang dapat menyelamatkan seseorang dari rantai kemiskinan sehingga semakin tinggi pendidikan akan membantu seseorang terbebas dari kemiskinan.

d) Pengaruh kesehatan terhadap kemiskinan

Berdasarkan laporan analisis kemiskinan menunjukkan $t_{hit} = -4,705$ dan $Sig. = 0,000 < 0,05$ sehingga H_0 ditolak yang berarti angka harapan hidup berpengaruh signifikan dan negatif secara parsial terhadap jumlah penduduk miskin. Koefisien variabel angka harapan hidup (γ_{13}) = $-0,963$, berarti apabila angka harapan hidup meningkat 1 tahun, akan menurunkan jumlah penduduk miskin di Bali sebesar 963 jiwa dengan asumsi variabel lainnya konstan. Sebaliknya, apabila angka harapan hidup menurun 1 tahun, akan meningkatkan jumlah penduduk miskin di Bali sebesar 963 jiwa dengan

asumsi variabel lainnya konstan. Hubungan kesehatan yang negatif terhadap kemiskinan sesuai dengan penelitian Finkayana dan Urmila Dewi(2016) dimana dengan membaiknya tingkat kesehatan seseorang diharapkan adanya peningkatan kualitas hidup seseorang juga. Meningkatnya kualitas hidup seseorang diharapkan tidak mengganggu proses produktivitas seseorang dalam bekerja untuk membantu seseorang terbebas dari kemiskinan.

e) Pengaruh pengangguran terhadap kemiskinan

Berdasarkan laporan analisis kemiskinan menunjukkan $t_{hit} = 0,696$ dan $Sig. = 0,490 > 0,05$ sehingga H_0 diterima yang berarti pengangguran tidak berpengaruh signifikan secara parsial terhadap jumlah penduduk miskin. Tidak berpengaruhnya pengangguran terhadap kemiskinan bisa saja dikarenakan pengangguran di Bali cenderung pada pengangguran friksional, dimana seseorang menganggur untuk mencari pekerjaan yang lebih baik. Koefisien variabel angka harapan hidup (γ_{14}) adalah sebesar 0,000.

2. Interpretasi model pertumbuhan ekonomi

a) Pengaruh jumlah penduduk miskin terhadap pertumbuhan ekonomi

Berdasarkan laporan analisis pertumbuhan ekonomi menunjukkan $t_{hit} = (-1,970)$ dan $Sig. = 0,055 > 0,05$ sehingga H_0 diterima yang berarti jumlah penduduk miskin tidak berpengaruh signifikan secara parsial terhadap pertumbuhan ekonomi. Kemiskinan tidak berpengaruh signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi bisa saja dikarenakan adanya bantuan social yang diberikan pemerintah bagi masyarakat kurang mampu sehingga walaupun termasuk dalam masyarakat kurang mampu masih dapat mengenyap

pendidikan, layanan kesehatan, pinjangan kredit untuk usaha, dan lainnya.

Koefisien variabel jumlah penduduk miskin (β_{21}) adalah sebesar -0,023.

b) Pengaruh tenaga kerja terhadap pertumbuhan ekonomi

Berdasarkan laporan analisis pertumbuhan ekonomi menunjukkan $t_{hit} = 4,337$ dan $Sig. = 0,000 < 0,05$ sehingga H_0 ditolak yang berarti tenaga kerja berpengaruh signifikan dan positif secara parsial terhadap pertumbuhan ekonomi. Koefisien variabel tenaga kerja (γ_{25}) = 6,205, berarti apabila tenaga kerja meningkat 1 jiwa, akan meningkatkan pertumbuhan ekonomi di Bali sebesar 6,205 persen dengan asumsi ceteris paribus. Sebaliknya, ketika tenaga kerja turun 1 jiwa, akan menurunkan tenaga kerja di Provinsi Bali sebesar 6,205 persen dengan asumsi variabel lainnya konstan. Hubungan tenaga kerja positif terhadap pertumbuhan ekonomi sesuai dengan penelitian Cahyani dan Darsana(2016); Adipuryanti dan Sudibia (2015); Barimbing dan Karmini (2015) dimana tenaga kerja memiliki kontribusi utama terhadap pertumbuhan ekonomi. Meningkatnya pertumbuhan ekonomi dikarenakan tenaga kerja disetiap sektor meningkatkan jumlah produksinya.

c) Pengaruh pendapatan asli daerah terhadap pertumbuhan ekonomi

Berdasarkan laporan analisis pertumbuhan ekonomi menunjukkan $t_{hit} = 0,310$ dan $Sig. = 0,758 > 0,05$ sehingga H_0 diterima yang memiliki arti bahwa pendapatan asli daerah berpengaruh tidak signifikan secara parsial terhadap pertumbuhan ekonomi. Tidak berpengaruhnya PAD terhadap pertumbuhan ekonomi bisa saja dikarenakan hanya sebagian pendapatan asli daerah yang dapat digunakan sehingga upaya dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi

tidak optimal. Koefisien variabel pendapatan asli daerah (γ_{26}) adalah sebesar 4,426.

d) Pengaruh investasi terhadap pertumbuhan ekonomi

Berdasarkan laporan analisis pertumbuhan ekonomi menunjukkan $t_{hit} = 1,049$ dan $Sig. = 0,299 > 0,05$ sehingga H_0 diterima yang berarti investasi berpengaruh tidak signifikan secara parsial terhadap pertumbuhan ekonomi. Tidak berpengaruhnya investasi terhadap pertumbuhan ekonomi bisa saja dikarenakan penanaman modal yang dilakukan masih belum memberikan hasil terhadap pertumbuhan ekonomi di Bali sepanjang periode 2009-2014. Koefisien variabel investasi (γ_{27}) adalah sebesar 7,470.

SIMPULANDAN SARAN

Simpulan

Pertama, pertumbuhan ekonomi, upah minimum, pendidikan, kesehatan, dan pengangguran secara serempak berpengaruh signifikan terhadap kemiskinan di Bali. Di sisi lain, kemiskinan, tenaga kerja, pendapatan asli daerah, dan investasi, secara serempak berpengaruh signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi di Bali. Kedua, hasil uji pada model kemiskinan menunjukkan variabel upah minimum, pendidikan, dan kesehatan berpengaruh signifikan secara parsial terhadap kemiskinan di Provinsi Bali. Di sisi lain hasil uji untuk model pertumbuhan ekonomi menunjukkan hanya variabel tenaga kerjayang berpengaruh signifikan secara parsial terhadap pertumbuhan ekonomi di Bali. Ketiga, tidak terjadi pengaruh timbal balik antara kemiskinan dan pertumbuhan ekonomi di Provinsi Bali. Pertumbuhan ekonomi secara parsial

berpengaruh signifikan dan positif terhadap kemiskinan, sedangkan kemiskinan tidak berpengaruh signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi.

Saran

Pertama, apabila kebijakan yang diambil pemerintah untuk menstabilkan ekonomi adalah dengan cara memacu pertumbuhan ekonomi, maka sebaiknya indikator yang difokuskan guna mewujudkan kebijakan tersebut adalah melalui pembentukan tenaga kerja yang berkualitas. Kedua, dalam menanggulangi kemiskinan melalui pertumbuhan ekonomi, pemerintah provinsi maupun kabupaten/kota di Bali sebaiknya lebih fokus pada pemanfaatan sektor produktif di setiap wilayah. Selain itu upaya penambahan penggunaan tenaga kerja berkualitas yang dipadukan dengan pemanfaatan teknologi, merupakan formulasi yang tepat untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat di setiap wilayah.

REFERENSI

- Adipuryanti, Ni Luh Putu Yuni dan I Ketut Sudibia. 2015. Analisis Pengaruh Jumlah Penduduk yang Bekerja dan Investasi Terhadap Ketimpangan Distribusi Pendapatan Melalui Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Kota Di Provinsi Bali. *Piramida*, 9 (1):20-28. Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Udayana.
- Badan Pusat Statistik. Sosial dan Kependudukan. Diakses dari <http://www.bps.go.id/>, diakses pada tanggal 5 Februari 2016.
- Badan Pusat Statistik Provinsi Bali. 2014. *Bali Dalam Angka*. Bali: BPS Provinsi Bali.
- Barimbing, Yesika Resianna dan Ni Luh Karmini. 2015. Pengaruh PAD, Tenaga Kerja, dan Investasi Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Di Provinsi Bali. *E-Jurnal Ekonomi Pembangunan Universitas Udayana*, 4 (5):434-450. Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Udayana.
- Budhi, Made Kembar Sri. 2013. Analisis Faktor-faktor yang Berpengaruh Terhadap Pengentasan Kemiskinan di Bali. *Jurnal Ekonomi Kuantitatif Terapan*, 6 (1):1-6.

- Cahyani, I Gusti Agung Ayu Ratih dan Ida Bagus Darsana. 2016. Analisis Pertumbuhan Ekonomi Bali Tahun 1996-2013. *E-Jurnal Ekonomi Pembangunan Universitas Udayana*, 5 (5):557-577. Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Udayana.
- Cholili, Fatkhul Mufid dan M.Pudjihardjo. 2014. Analisis Pengaruh Pengangguran, Produk Domestik Regional Bruto (PDRB), dan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Terhadap Jumlah Penduduk Miskin. *Jurnal Ilmiah Mahasiswa FEB*, 2 (1): Semester Ganjil 2013/2014. Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Brawijaya.
- Dariwardani, Ni Made Inna. 2014. Analisis Dinamika (*Poverty Dynamics*) di Bali Berdasarkan Data Susenas Panel 2008 – 2010. *Jurnal Ekonomi Kuantitatif Terapan*, 7 (1):7-15.
- Dewi, Ni Made Sintya dan I Ketut Sutrisna. 2015. Pengaruh Investasi dan Ekspor Terhadap Penyerapan Tenaga Kerja Melalui Pertumbuhan Ekonomi. *E-Jurnal Ekonomi Pembangunan Universitas Udayana*, 4 (6):621-636. Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Udayana.
- Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi. 2013. *Pendidikan Anti Korupsi: Dampak Sosial dan Kemiskinan*. Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia.
- Faisal, Herry. 2013. Pengaruh Tingkat Pendidikan, Kesehatan Terhadap Produktivitas dan Jumlah Penduduk Miskin Di Provinsi Kalimantan Barat. *Tesis Fakultas Ekonomi Universitas Tanjung Pura*.
- Farthing, Rys. 2010. Health, inequality and child poverty in London. *London Journal of Primary Care*, 3 (1):2-4.
- Febrianica, Danny Nur dan Devanto Shasta Pratomo. 2015. Analisis Dampak Kebijakan Upah Minimum Terhadap Kemiskinan Di Indonesia. *Jurnal Ilmiah Mahasiswa FEB*, 3 (1): Semester Ganjil 2014/2015. Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Brawijaya.
- Finkayana, I Putu Arya dan Made Heny Urmila Dewi. 2016. Analisis Pertumbuhan Ekonomi dan Indikator Komposit IPM Terhadap Jumlah Penduduk Miskin Di Provinsi Bali Tahun 2004 – 2013. *E-Jurnal Ekonomi Pembangunan Universitas Udayana*, 5 (7):861-881. Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Udayana.
- Gujarati, Damodar N. and Porter, Dawn C. 2009. *Basic Econometrics 5th Ed.* New York: McGraw-Hill.

- Hull, Katy. 2009. Understanding the Relationship between Economic Growth, Employment and Poverty Reduction. *OECD*, pp. 69-94.
- Istifaiyah, Lailatul. 2015. Analisis Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, Upah Minimum Dan Pengangguran Terbuka Terhadap Tingkat Kemiskinan. *Jurnal Ilmiah Mahasiswa FEB*, 3 (2): Semester Ganjil 2014/2015. Fakultas Ekonomi dan bisnis Universitas Brawijaya.
- Jiang, Miaoyi and Chau-kiu Cheung. 2009. Burdens from Educational Expenses on Chinese Children Living in Poverty. *International Journal of Adolescence and Youth*, 15 (3):175-192.
- Jonaidi, Arius. 2012. Analisis Pertumbuhan Ekonomi Dan Kemiskinan Di Indonesia. *Jurnal Kajian Ekonomi*, 1 (1):140-162.
- Kunle, Adeleke M.; Olowe S.O.; Fasein OladipoOluwafolakemi. 2014. Impact of Foreign Direct Investment on Nigeria Economics Growth. *International Journal of Academic Research*, 4 (8):234-242.
- Malloy, Liam C. 2016. The minimum wage, bargaining power, and the top income share. *Forum for Social Economics*.
- Nazara, Suahasil. 2006. Penanggulangan Kemiskinan: Kondisi Terkini, Isu, dan Tantangan. Diktat Kuliah pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia.
- Prastyo, Adit Agus. 2010. Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Tingkat Kemiskinan. *Skripsi* Fakultas Ekonomi Universitas Diponegoro.
- Putri, I.A Septyana Mega dan Ni Nyoman Yuliarmi. 2013. Beberapa Faktor Yang Memengaruhi Tingkat Kemiskinan Di Provinsi Bali. *E-Jurnal Ekonomi Pembangunan Universitas Udayana*, 2 (10):441-448. Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Udayana.
- Republik Indonesia. 1945. Undang-Undang Dasar Tahun 1945. <http://www.dpr.go.id/uu/>.
- 2014. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah. <http://www.dpr.go.id/uu/>.
- 2013. Peraturan Menteri Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Nomor 7 Tahun 2013 Tentang Upah Minimum. <https://aswinsh.wordpress.com>.
- Silva, Indunil De and Sudarno Sumarto. 2014. Does Economic Growth Really Benefit the Poor? Income Distribution Dynamics and Pro-poor Growth in Indonesia. *Bulletin of Indonesian Economic Studies*, 50 (2):227-42.

- Sudiana, I Wayan dan I Ketut Sudiana. 2015. Pengaruh PDRB, Pendidikan, dan Struktur Tenaga Kerja Terhadap Kemiskinan Di Provinsi Bali. *E-Jurnal Ekonomi Pembangunan Univeritas Udayana*, 4 (6):608-620. Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Udayana.
- Sukirno, Sadono. 2004. *Makroekonomi Teori Pengantar*. Edisi Ketiga. Jakarta: PT. Raja Grafindo Perkasa.
- Taufik, Muhammad; Eny Rochaida; Fitriadi. 2014. Pengaruh Investasi Dan Ekspor Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Serta Penyerapan Tenaga Kerja Provinsi Kalimantan Timur. *Jurnal Ekonomi Kuantitatif Terapan*, 7 (2):90-101.
- Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan. 2014. Upaya Khusus Penurunan Tingkat Kemiskinan: Panduan Penargetan Program Penanggulangan Kemiskinan Berbasis Wilayah, Jakarta: TNP2K.
- Waisgrais, Sebastian. 2003. Wage Inequality and the Labour Market in Argentina: Labour Institutions, Supply and Demand in the Periode 1980-99. *International Institute for Labour Studies*, DP/146/2003.
- Wiguna, Van Indra dan Rachmad Kresna Sakti. 2013. Analisis Pengaruh PDRB, Pendidikan, dan Pengangguran Terhadap Kemiskinan Di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2005-2010. *Jurnal Ilmiah Mahasiswa FEB*, 1 (2): Semester Ganjil 2012/2013. Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Brawijaya.
- World Bank. 2000. *HANDBOOK ON Poverty and Inequality*. Washington, DC. World Bank.
- Yudha, Okta Ryan Pranata. 2013. Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, Upah Minimum, Tingkat Pengangguran Terbuka, dan Inflasi Terhadap Kemiskinan Di Indonesia Tahun 2009-2011. *Skripsi* Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Semarang.
- Yuhendri. 2013. Pengaruh Kualitas Pendidikan, Kesehatan, Dan Investasi Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Di Sumatera Barat. *Jurnal Ekonomi Pembangunan* Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Padang.
- Yusuf, Arief Anshory and Andy Summer. 2015. Growth, Poverty, and Inequality under Jokowi. *Bulletin of Indonesian Economic Studies*, 51 (3):323-48.